**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Berkaitan dengan isu pembangunan dan lingkungan hidup, dalam setiap pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota yang asri dengan ruang terbuka *(open space).* Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.

Kebijakan yang menjadi acuan dalam Pemeliharaan Ruang terbuka hijau (RTH) ialah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktural dan pola ruang. Selanjutnya aturan normatif daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan RTH yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menyatakan bahwa Walikota berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.

 Pola dan struktur ruang Kota Bandung memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu menyokong perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup *(to live),* bekerja *(to work),* dan bermain *(to play),* sehingga kelancaran mobilitas warga serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama. Dibutuhkan perencanaan dan pengendalian yang komprehensif dalam pemanfaatan ruang kota.

Kegiatan penataan ruang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Dalam rangka menciptakan penataan ruang terutama taman kota yang baik, substansi kebijakan perkotaan adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan RTH khususnya Taman Kota yang terkonsolidasi, terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, berkesinambungan dan harmoni. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan (**Djamin** dalam **Hasibuan 2006 :86**)

Taman Kota adalah salah satu perwujudan dari ruang terbuka kota yang sangat penting sebagai fasilitas publik. Keberadaan taman kota memiliki banyak kegunaan seperti peresapan air, mengurangi polusi, sebagai tempat berolah raga, rekreasi, ekonomi, dan edukatif. Kegunaan lain yang tidak kalah penting adalah fungsi sosial dari keberadaan taman sebagai tempat masyarakat bersosialisasi sehingga terciptanya kehidupan harmonis. Taman kota diyakini dapat menumbuhkan rasa sosialis yang tinggi di dalam lingkungan perkotaan yang kini mengarah pada individualis. Menumbuhkan rasa toleransi, tidak hanya terhadap sesama manusia melaikan terhadap mahkluk hidup lain.

Mayoritas masyarakat lebih memilih menghabiskan waktu di tempat ber-AC seperti mall. Padahal udara yang jernih sangat diperlukan bagi manusia. Apalagi bagi penduduk perkotaan yang dalam 5/6 hari sebelumnya mereka habiskan dengan bekerja keras dalam lingkungan yang kurang berkualitas. Taman yang baik merupakan cerminan kota dengan manusia (masyarakat) yang baik. Masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah kota, sehingga kualitas masyarakat akan mempengaruhi kualitas sebuah kota.

 Pemerintah menyediakan Taman Kota sebagai fasilitas yang berkontribusi terhadap kualitas lingkungan dan bekerja sebagai sarana melawan kehidupan monoton di perkotaan. Hal ini melengkapi peran taman secara umum selain fungsi estetika. Keseriusan pemerintah terhadap peremajaan Taman Kota sebagai pusat kegiatan sosial dibutuhkan terutama di Kota Bandung. Pemerintah kota Bandung melalui DPKP3 menggalakkan program Taman Tematik agar bagaimana caranya taman kota dapat memberikan *service* bagi pengunjung agar mereka yang datang mendapatkan rasa kepuasan.

 Walikota Bandung, memfokuskan pembangunan bidang RTH (Ruang Terbuka Hijau) membuat program revitalisasi dan pengaktifan taman-taman kota dengan tema-tema tertentu atau disebut Taman Tematik. Makna dari Taman Tematik ini untuk menarik minat masyarakat dengan memberikan tema tertentu terhadap beberapa taman, menambah elemen-elemen taman, memperbaiki fasilitas untuk menunjang kegiatan dan kreativitas masyarakat. Penamaan atau tema pada taman disesuaikan dengan fungsi, pengguna dan ciri khas yang ingin ditampilkan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan program Taman Tematik dimaksudkan sebagai wadah bagi berbagai macam kegiatan masyarakat.

 Koordinasi dibutuhkan oleh manajemen pemerintahan. Koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak dalam suatu hubungan kerja untuk mencegah tumpang-tindih dalam pekerjaan. Pemerintah memegang peranan penting sebagai penyelenggara layanan (taman kota) di Perkotaan. Pemerintah kota sebagai pembuat aturan dan penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pengguna. Agar terselenggara pengelolaan taman yang baik, maka pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) sebagai pemegang kewenangan di bidang pertamanan.

 Berdasarkan data dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Aspek spasial ruang ; Belum ada *masterplan* RTH, Pola sebaran RTH belum merata
2. Aspek kelembagaan : belum ada sinergitas program antar instansi terkait; pendanaan, SDM dan Pendukung operasional belum optimal
3. Aspek Masyarakat : kurangnya *awareness* dari masyarakat terhadap eksistensi RTH sebagai Ruang Publik

Dari tiga poin yang difokuskan adalah koordinasi dari aspek kelembagaan dan aspek masyarakat Perlu dukungan dalam pengaturan, pengelolaan, pengawasan yang berjalan efektif dan efisien.

Guna mendukung pengelolaan Taman Tematik agar terhindar dari kekacauan dan tumpang tindih pekerjaan diperlukan koordinasi yang baik. Koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan Taman Tematik harus dilakukan tidak hanya secara internal dalam masing-masing lembaga penyelenggara khususnya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3). Koordinasi secara eksternal antar lembaga tersebut tidak kalah penting begitu pula dengan kepedulian masyarakat sebagai konsumen juga secara tidak langsung dapat dilibatkan. Kepekaan dan Kepedulian masyarakat terhadap ruang publik tidak hanya sekedar untuk menjaga dan menikmati fasilitas yang ada, artinya dilakukan koordinasi secara menyeluruh.

 Kuantitas Taman Kota di Bandung pada dasarnya cukup memadai meskipun belum merata namun pengelolaan dan pemeliharaannya yang belum optimal. Seiring berjalan 3 tahun pasca revitalisasi beberapa Taman Kota Bandung menjadi Taman Tematik, tentu akan muncul kekurangan atau kerusakan fasilias-fasilitas yang ada misalnya yang terjadi di Taman Lansia ; bangunan yang awalnya ditujukan untuk perpustakaan umum dialih fungsikan menjadi musholla kini terlihat bocor, lampu taman yang tidak menyala/rusak, dan yang paling membuat pengunjung resah adalah adanya beberapa preman yang mangkal didalam taman terutama pada malam hari

 Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Taman Tematik di Kota Bandung maka koordinasi diperlukan mengingat pengelolaan taman tidak hanya secara struktural tapi juga fungsional untuk memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak terkait. Dalam mengatasi permasalahan dari aspek kelembagaan dan aspek masyarakat. Diharapkan hubungan kerja dan koordinasi dapat terjalin dengan baik serta berkesinambungan dalam pemeliharaan dan pengelolaan Taman Tematik tetap prima untuk masyarakat. Dari uraian peristiwa tersebut peneliti tertarik untuk meneliti judul **“Koordinasi Pengelolaan Taman Tematik Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (Studi Kasus : Taman Lansia Jalan Cilaki Atas Kota Bandung)”.**

1. **Perumasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasikan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam mengelola taman tematik ?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam mengelola taman tematik ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam mengelola taman tematik ?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

 Sesuai dengan identifikasi diatas penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam mengelola taman tematik, khususnya Taman Lansia.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam mengelola taman tematik, khususnya Taman Lansia.
3. Menemukan upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam mengelola taman tematik.
4. **Kegunaan Penelitian**

 Hasil penelitian ini memiliki kegunaan beberapa kegunaan yaitu secara akademis dan praktis, seperti :

1. Kegunaan Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan (teori), pengalaman dan memperluas wawasan serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh Gelar Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan taman tematik di Kota Bandung.